

**IBNU TAIMIYAH'S POLITICAL THINKING
(EMPLOYEE APPOINTMENT AND STATE FINANCIAL
MANAGEMENT)**

By : Zul Hilmi

Supervisor: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Appointment of employees and management of state finances are two things that cannot be separated. Appointment of employees will not be carried out without involving financial management and financial management will not be carried out without an employee in charge of managing it. Therefore, it is not surprising that the appointment of employees and financial management are two things that cannot be separated.

This study aims to find out how the appointment of employees and financial management according to the political thought of Ibn Ibn Taymiyah, who is a person who is known as a scholar and also the father of Islamic administration. This is very interesting because it is very rare for anyone to thoroughly discuss the appointment of employees and the management of state finances based on the thoughts of Ibn Taimiyah. This study uses a qualitative approach. This type of research is qualitative with descriptive analysis model. The data were collected by means of library research, where the researcher used the library as a source of data collection.

The results of this study are according to Ibn Taimiyah in the appointment of employees, a ruler should not be careless and must select correctly and carefully every person who will be appointed as an employee. According to Ibn Taymiyya, state finances must be managed by the state properly and in a trustworthy manner and should not misappropriate these assets.

Keywords: *Appointment of employees, Financial Management, Ibn Taimiyah*

PENDAHULUAN

Pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai negeri adalah orang yang melaksanakan tugas-tugas negara atau pemerintahan, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan nasional, diharapkan pegawai bekerja secara produktif. Pengelolaan pegawai secara profesional ini harus dimulai sejak perekrutan pegawai, penyeleksian, pengklasifikasian, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan, peraturan, dan pengembangan kariernya.

Kuangan Negara merupakan pilar fundamental bangsa. Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Negara. Tak sedikit posisinya di beberapa lembaga atau badan hukum masih diperdebatkan oleh beberapa anak bangsa. Untuk mengatasi itu, keuangan Negara harus dikembalikan ke khittahnya. Jati diri keuangan Negara perlu dibedah untuk mengidentifikasi ciri dan inti keuangan Negara.

Aliran keuangan Negara dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban selalu tak luput dari terpaan godaan penyimpangan. Uniknya, tubuh keuangan Negara selalu ternoda, namun jarang ada pihak yang mau mengakuinya. Jati diri keuangan Negara jelas-jelas terkoyak, namun sidik jari pelaku susah diburu, bahkan jika teridentifikasi pun, pelaku selalu mengelak.

Dalam sejarah perkembangan Islam, Ibnu Taimiyah sendiri dikenal sebagai seorang ulama dan pemikir politik yang pertama kali menggulirkan gerakan (pembaruan) reformasi cara berpikir umat. Ia memiliki berbagai keistimewaan seperti pemikiran tajam, daya ingat yang kuat, keberanian dan ketekunan memperjuangkan kebenaran.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Seperti diketahui, sudah lama kekuasaan pemerintahan tidak lagi berada di tangan khalifah yang bertahta di Baghdad, melainkan pada penguasa wilayah atau daerah, baik yang bergelar sultan, raja, atau amir. Tetapi wilayah kekuasaan mereka kemudian dipersempit atau bahkan ada yang direbut oleh penguasa-penguasa Tatar dari timur atau Crusader dari barat. Jatuhnya Baghdad ke tangan Tatar, yang berarti pula berakhirnya dinasti Abbasiyah merupakan klimaks proses disintegrasi itu. Masa ini bertepatan pada akhir kejatuhan Kekhalifahan Abbasiyah di Kota Baghdad pada masa khalifah Al-Mu'tashim dan berdirinya Kesultanan Mamluk Di Mesir yang menguasai negeri sekitarnya termasuk Syam.

Dalam kondisi umat islam yang seperti itu, menurut penulis wajar saja rasanya walaupun terasa kontroversial jika Ibnu Taimiyah berpendapat atau mengeluarkan fatwa bahwa "60 tahun di bawah pemerintahan imam (kepala negara) yang zalim (tirani), lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara". Hal ini dikarenakan kondisi umat islam pada masa itu dapat dikatakan berada pada titik terendahnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Ibnu Taimiyah seorang ulama yang ahli hadis memiliki fatwa-fatwa yang terasa agak kontroversial, yaitu diantaranya "60 tahun di bawah pemerintahan imam (kepala negara) yang

zalim (tirani), lebih baik daripada satu malam tanpa kepala negara”. Penulis hanya ingin membuat sebuah abstraksi pemikiran politik Ibnu Taimiyah terutama berkaitan dengan pengangkatan pegawai dan pengelolaan keuangan negara sehingga bisa menghasilkan sebuah produk pemikiran politik.

Alasan lain yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji pembahasan ini, jika memang perlu dikemukakan adalah Ibnu Taimiyah merupakan seorang ulama yang sangat cerdas yang menghasilkan banyak karya tulis diberbagai bidang termasuk politik. Diantara berbagai karya tulisnya dibidang politiknya adalah buku *As-Siyasah Al-Syar'iyah* yang merupakan salah satu karya tulis fenomenalnya dibidang politik. Akan tetapi, masih sedikit dan bahkan tidak ada skripsi dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau yang mencoba untuk mengulas dan membahas karya tulis dari ulama islam yang ternama tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut yaitu:

“ Bagaimana Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah (Pengangkatan Pegawai Dan Pengelolaan Keuangan Negara) ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah : Untuk menggambarkan bagaimana pemikiran politik Ibnu Taimiyah terutama mengenai pengangkatan pegawai dan pengelolaan keuangan negara.

KERANGKA TEORI

Pemikiran politik adalah suatu bidang yang sangat menarik di dalam politik. Ia membawa kita tidak saja kepada pemahaman seorang pemikir terhadap sesuatu masalah politik yang menjadi pusat perhatiannya, tetapi juga sering menghadapkan kita pada suatu “debat” antara pemikir tersebut dengan para pemikir lainnya. Malah tidak jarang pemikiran politik menampilkan perbincangan antara seorang pemikir dengan masyarakat secara keseluruhan. Dalam diskusi semacam itu, kita tidak hanya mengetahui tentang *apa* yang dipikirkan oleh para pemikir politik itu, melainkan juga *mengapa* masalah itu mereka pikirkan. “*Apa*” dan “*mengapa*” ini sebenarnya tidaklah hanya mencerminkan alam pikiran masing-masing pemikir, malah lebih jauh daripada itu ia sering melambangkan hasil pemantauan terhadap perkembangan keadaan dan pemikiran yang ada dalam masyarakat luas. Mengapa suatu masalah menjadi pusat perhatian seorang pemikir, tidak lain karena keadaan masyarakat yang memang sedang merisaukan atau mempersoalkan tentang dirinya. Masyarakat yang sedang menghadapi sesuatu masalah politik menghendaki agar para pemikir politik memikirkannya secara mendalam, sehingga mereka dapat memberikan informasi yang diperlukan masyarakat di dalam membuat pilihan-pilihan politik.

Dalam berpikir politik, manusia dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Pertama, berupa nilai-nilai yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama yang dianutnya, ideologi yang diyakininya, disposisi kepribadiannya, subjektivitasnya, dan respon politiknya. kedua, merupakan lingkungan domestik dan internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Berdasarkan hal ini, Craine Brinton berpendapat bahwa ada dua metode yang dapat digunakan

untuk mengetahui pemikiran politik seseorang :

- (a) Metode Subjektif, yaitu penelaahannya terhadap pemikiran dan bagaimana ia menghasilkan pemikiran tersebut.
- (b) Metode Objektif, yaitu penelaahan terhadap hasil pemikirannya dan bagaimana pengumpulannya dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut Prof. Nazaruddin, yang perlu dipertanyakan apabila kita memfokuskan kajian pada pemikiran politik adalah “apa yang dipikirkan oleh seseorang “ dan “bagaimanakah orang itu sampai berpikir demikian”.

Secara umum, pemikiran politik dalam operasionalnya merupakan penjelmaan dari obsesi, potensi intelektual dan sosialisasi politik, dan representasi realitas lingkungan sosial dengan pusat perhatian mengenai negara, masyarakat dan kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa studi tentang pemikiran politik seorang tokoh akan membahas tiga variabel, yakni:

1. Variabel latar belakang kehidupan atau biografi sang pemikir sebagai faktor yang mempengaruhi segala pemikirannya. Adapun faktor-faktor biografi tersebut meliputi: (a) lingkungan keluarga dan pendidikan, (b) aktivitas bisnis dan organisasi kelompok kepentingan, (c) kedekatan dengan aktivitas politik atau partai politik tertentu, dan (d) obsesi politik dan sejumlah karya tulis.
2. Variabel tema-tema penting yang menjadi fokus perhatian sang pemikir dan alasan-alasan argumentatif mengapa tema itu menjadi perhatiannya
3. Variabel aksi politik atau partisipasi politik atau partisipasi politik sang

pemikir. Sangat banyak pemikir politik yang tidak hanya menggulirkan gagasan ideal normatif, tetapi juga berusaha terlibat langsung dalam peraturan politik praktis.

Salah satu pemikiran politik Indonesia adalah Islam. Hal tersebut dapat dipahami salah satunya karena penduduk Indonesia bermayoritaskan umat Islam. Karena itu pemikiran politik Islam menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam politik Islam (*siyasa*), pemikiran politik berarti segala pemikiran politik berarti segala pemikiran tentang politik yang berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan umat.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan Jenis penelitian ini adalah model analisa deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui buku dan dokumen. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1, PENGANGKATAN PEGAWAI

Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah pelaksanaan dalam pengangkatan dan penempatan dalam jabatan baik struktural maupun fungsional. Proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang baik akan menghasilkan penyelenggaraan organisasi yang sehat, namun sebaliknya kesalahan dalam proses pengangkatan pegawai akan memberikan dampak yang tidak sehat antara lain tidak tercapainya tujuan organisasi, hubungan kerja yang tidak harmonis, cara kerja yang tidak efektif dan efisien, serta penyimpangan prosedur kerja. Oleh karena itu kegiatan pengangkatan pegawai haruslah mengambil semangat “The right man on the right place”. Indonesia sendiri

telah memiliki undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN yang sangat ketat sekali. Namun pada kenyataannya, individu yang melaksanakan perundang-undangan tentang ASN tersebutlah yang bermasalah.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa negara. Karenanya, Ibnu Taimiyah menolak *ijma'* sebagai landasan kewajiban tersebut. Ibnu Taimiyah sendiri dalam pemikiran politiknya lebih menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial dimana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut. Jadi, menurut Ibnu Taimiyah penegakan imamah bukanlah merupakan satu asas atau dasar agama, melainkan hanya kebutuhan praktis saja. Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menekankan fungsi negara untuk membantu agama. Berdasarkan pandangannya, Ibnu Taimiyah menolak kekuasaan bani Umayyah dan bani Abbasiyah sebagai dasar filsafat politik Islam. Ia tidak membenarkan khalifah-khalifah bani Abbas yang hanya dijadikan boneka oleh sekelompok elite.

Ibnu Taimiyah dalam pemikiran politiknya, Ibnu Taimiyah berbicara tentang pentingnya pemerintahan dengan otoritas kekuasaan (*ahammiyatul wilayah*) yang ada padanya dan pegawai atau pejabat sebagai perpanjangan tangan penguasa. Pentingnya pemerintahan ini menurut Ibnu Taimiyah merujuk pada realitas bahwa kekuasaan untuk mengelola urusan umat melalui perpanjangan tangannya yakni pegawai merupakan kewajiban agama yang paling agung (*wilayatu amrin nas min a'zami wajibat al-din*) karena menurutnya, agama tidak

mungkin bisa tegak, dalam arti diamalkan, tanpa otoritas kekuasaan atau pemerintah (*bal la qiyama illa biha*). Sebagaimana diungkapkan para pemikir politik Islam sebelum Ibnu Taimiyah tentang kemestian manusia hidup bermasyarakat, Ibnu Taimiyah berpendapat sama, yaitu bahwasanya umat manusia (*Bani Adam*) tidak akan mampu mencukupi semua kebutuhan hidupnya tanpa bermasyarakat dan saling bantu membantu dalam kehidupan sesama mereka (*Anna bani Adam la tatimmu maslahatun illa bil ijtima'*), dan sebagai kelanjutan dari fenomena ini umat manusia sangat memerlukan seorang pemimpin atau kepala negara (*al-hajatu ila ra'sin*). Berdasarkan pernyataan Ibnu Taimiyah di atas, dapat ditegaskan bahwa betapa pentingnya seorang pemimpin dalam sekecil apapun komunitas manusia, sehingga Nabi Muhammad S.A.W bersabda bahwa

Jika ada tiga orang keluar berpegiان, hendaknya diangkatlah seorang dari mereka menjadi amir atau kedua (fal yuammiru ahaduhum)

Demikianlah Nabi Muhammad S.A.W mewajibkan mengangkat *amir* atau ketua meskipun dalam kumpulan kecil sekalipun saat dalam perjalanan. Hal ini sebagai indikasi betapa pentingnya seorang ketua atau pemimpin dalam suatu komunitas atau perkumpulan apa pun, lebih-lebih perkumpulan besar organisasi negara. Maka dari hal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut Ibnu Taimiyah pengangkatan seorang ketua atau pemimpin negara menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan pandangannya tentang betapa pentingnya otoritas kekuasaan atau pentingnya kewujudan sultan beserta pegawainya bagi menjamin kehidupan yang nyaman, aman, dan tentram, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa keberadaan sulthan (kepala negara) meskipun zalim lebih baik bagi umat manusia

dibandingkan jika mereka hidup satu malam tanpa sultan. Hal ini wajar saja, karena negara pada saat Ibnu Taimiyah hidup sedang mengalami guncangan yang sangat dahsyat terutama dibidang politik, konflik dan disintegrasi sebagai akibat dari serangan bangsa Tentara Tartar dari Mongolia, dengan pernyataan itu diharapkan loyalitas rakyat terhadap khalifah dapat dipertahankan dan kesatuan umat Islam tetap dapat dipelihara.

Salah satu karya tulis Ibnu Taimiyah yang paling populer dibidang politik adalah buku *Siyasah Syar'iyah*. Buku ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah karena pada masa Kesultanan Mamluk, ia diminta oleh gubernur Qaish al-Manshuri ketika ia singgah di Gaza. Buku Ibnu Taimiyah yang satu ini menjelaskan tentang cara memimpin rakyat, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh penguasa bersama mereka, dan pengangkatan pegawai yang merupakan perpanjangan pemerintah itu sendiri untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. Permintaan itu pun ia sanggupi dan menulis apa yang dimintanya itu hanya dalam waktu satu malam hingga pagi. Salah satu pembahasan dalam buku ini dan menjadi bagian pertama yang dibahas adalah tentang pengangkatan pegawai sebagai perpanjangan tangan penguasa. Dalam pengangkatan pegawai, seorang penguasa tidak boleh sembarangan dan harus menyeleksi dengan benar dan teliti setiap orang yang akan diangkat menjadi pegawai.

Pegawai yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dalam pembahasan ini adalah pegawai dalam pengertian umum dan bukan secara khusus. Hal ini diantaranya karena Ibnu Taimiyah tidak memfokuskan pembahasannya terhadap pegawai profesi tertentu dan cenderung bersifat umum serta menyeluruh yang bersifat normatif (-pen). Adapun penjelasan yang lebih lengkapnya adalah sebagai berikut

2. PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa jika otoritas kekuasaan sudah berada di genggaman seorang penguasa (kepala negara), hendaknya dapat menghindari sikap dan perilaku ambisius kekuasaan dan harta kekayaan. Menurutnya, manusia menjadi rusak karena hanya mengejar kekuasaan atau harta kekayaan. Ibnu Taimiyah menegaskan kembali bahwa ambisi manusia terhadap harta kekayaan dan kekuasaan dapat merusak agamanya, bahkan lebih berbahaya ketimbang mengirim dua ekor serigala lapar ke kandang kambing.

Karena ambisi ini akan menutup hati nuraninya dan pemikiran objektifnya, yaitu pemikiran yang berdasarkan pertimbangan akal sehat. Dengan ambisi ini seseorang akan berupaya dengan berbagai cara, halal maupun haram tidak peduli, yang penting mencapai tujuan, yaitu kedudukan atau kekuasaan. Begitu juga dengan ambisi untuk memiliki harta kekayaan sebanyak-banyaknya, tidak peduli dengan cara apa yang dilakukan, tidak peduli halal maupun haram.

Jika ambisi yang ingin dikejar adalah kekuasaan, maka menurut Ibnu Taimiyah lagi tidak ada bedanya dengan Fir'aun; seorang Raja otoriter dan diktator yang hidup di zaman Nabi Musa. Sementara yang berambisi harta kekayaan tidak ada bedanya dengan Qarun, yang pada awalnya adalah seorang fakir miskin kemudian menjadi orang yang kaya raya tetapi lupa untuk bersyukur. Pembahasan kedua dalam buku politik karangan Ibnu Taimiyah adalah tentang keuangan negara. Sebagaimana kekuasaan adalah amanah, maka begitu pula dengan harta benda juga termasuk amanah. termasuk dalam bagian ini adalah uang emas dan perak, utang piutang khusus maupun umum, seperti pengembalian barang-barang titipan, harta milik mitra (dagang), harta yang

dikuasakan, harta mudharabah, harta yang diamanahkan, harta anak yatim dan wakaf dan lain sebagainya. Begitu pula termasuk dalam kategori ini adalah pelunasan hutang dari harga barang-barang yang terjual, pengganti pinjaman, mahar, sewa jasa dan lain sebagainya harus diatur oleh negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah dalam pemikiran politiknya, Ibnu Taimiyah berbicara tentang pentingnya pemerintahan dengan otoritas kekuasaan (ahammiyatul wilayah) yang ada padanya dan pegawai atau pejabat sebagai perpanjangan tangan penguasa. Dalam pengangkatan pegawai, seorang penguasa tidak boleh sembarangan dan harus menyeleksi dengan benar dan teliti setiap orang yang akan diangkat menjadi pegawai. Ibnu Taimiyah yang juga dikenal sebagai salah satu bapak administrasi Islam dan dikenal sebagai penyumbang besar dalam bidang administrasi dan manajemen melalui karyanya yang terkenal *Asy-Siyasah Asy-Syari'iyah*. Buku kecil tersebut lahir enam abad mendahului karya-karya Federick W. Taylor dan Henry Fayol, menggunakan metode ilmiah dalam menuliskan masalah-masalah administrasi dalam kerangka Islam. Di dalamnya dibahas tugas dan tanggung jawab seorang eksekutif, prinsip-prinsip kompetensi dalam pemilihan personalia dengan landasan *the tight man on the right job*. Ia juga menjelaskan secara rinci tentang “kebakakan” (*patronage*), pavoritisme, dan nepotisme sebagai perusak administrasi efektif, dan juga membahas konsep-konsep yang akhirnya dikenal dengan sistem “konco” (*spoil system*). Lebih jauh lagi ia membahas masalah-masalah persamaan di dalam manajemen, keadilan dalam mengumpulkan dan membagikan dana, konsultasi, pengambilan keputusan, dan lain-lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Terlengkap Peradaban Islam*, Yogyakarta : Noktah, 2017.
- Al-Jamal, Muhammad, “*Biografi 10 Imam Besar*”, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-‘Usairy, Ahmad, *Sejarah Islam*, Jakarta : Akbar Media, 2010.
- Al-‘Utsaimin, bin Shalih, Muhammad, “ *Politik Islam : Penjelasan Kitab Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah* “, Penerjemah : Ajmal Arif, Jakarta Timur : Griya Ilmu, 2019.
- Aly, Sirojuddin, “*Pemikiran Politik Islam : Sejarah, Praktik, dan Gagasan*”, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Agung, Ngurah, Gusti, I, “*Metode Penelitian Sosial : Pengertian dan Pemakaian Praktis*”. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Gatara, Sahid, A.A, “*Ilmu Politik (memahami dan menerapkan)*”, Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 2008.
- Hitti, K, Philip “*History of the Arabs*” Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam : Pra Kenabian Hingga Islam Di Nusantara*, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Iqbal, Muhammad & Nasution, Husein, Amir “*Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*”, Depok : Kencana, 2017.

- Jindan, Ibrahim, Khalid, *“Teori Politik Islam : telaah kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan islam”*. Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Kelola, Akbar *“Kamus Istilah Politik Kontemporer”* Yogyakarta : Cakrawala, 2009.
- Martono, Nanang, *“Metode Penelitian Sosial : Konsep-Konsep Kunci”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad, Mu’ti, Abdul, Ali, *“Filsafat Politik Antara Barat Dan Islam”*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2010.
- Nicole, David, *“Jejak sejarah Islam”*, Jakarta : Alita Aksara Media, 2012.
- Pulungan, Suyuthi, *“Sejarah Peradaban Islam”*, Jakarta : Amzah. 2018
- Riswanto, Munandar, Arif, *“Buku Pintar Islam”*, Bandung : Penerbit Mizan, 2010.
- Satori, Djam’an dan Komariah, Aan, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung : Alfabeta cv, 2011.
- Saebani, Ahmad, Beni, *“Fiqh Siyasah”*, Bandung : Pustaka Setia, 2008
- Situmorang, Jubair, *“Politik Ketatanegaraan Dalam Islam, (Siyasah Dusturiyah)”*, Bandung : Pustaka Setia Bandung, 2012.
- Situmorang, Jubair, *“ Model Pemikiran Dan Penelitian Politik Islam “*, Bandung : Pustaka Setia, 2014.
- Suparmoko, M, *Keuangan Negara : Dalam Teori Dan Praktek*, Yogyakarta : BPFE, 2000
- Supriadi, Dedi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Syamsuddin, Nazaruddin, *“Soekarno : Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek”*, Jakarta : Rajawali, 1988.
- Syazali, Munawir, *“Islam Dan Tata Negara”*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1990.
- Taimiyah, Ibnu, *“Al-Siyasah al-Syar’iyah”*, Kairo : Dar al-Sya’b, 1980.
- Taimiyah, Ibnu, *“Berpolitik Dalam Bingkai Syariah”*, penterjemah : Abdul Hafs Al-Faruq, Sukoharjo : Al-Qowam, 2018.
- Taimiyah, Ibnu, *“ Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah Tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Kekuasaan, Siyasah Syar’iah, Jihad Fi Sabilillah “*, penterjemah : Ahmad Syaikh, Luqman Hakim, Jakarta : Darul Haq, 2005.
- Taimiyah, Ibnu, *“ Pedoman Islam Bernegara “*, Penterjemah : K.H Firdaus a.n , Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Thaba, Aziz, Abdul, *“Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994).* Jakarta : Gema Insani Press.
- Thoha, Miftah, *“Manajemen kepegawaian Sipil Di Indonesia”*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005.

Qayim, Ibnu, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Yunus, Muhammad, "*Kamus Arab – Indonesia*", Jakarta : Hidakarya Agung, 1989

Yusuf, Anwar, Ali., "*Islam dan Sains Modern : Sntuhan Islam terhadap berbagai disiplin ilmu*". Bandung : Pustaka Setia, 2006.

Zed, Mestika, "*Metode Penelitian Kepustakaan*", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Artikel Ilmiah

Abdurrahman, M, "*Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*", dosen tetap Fakultas Syaria'h, UNISBA Volume XIX No. 2 April - Juni 2003 : 152 – 158.

Arif, Muhammad, "*Gagasan Sekularisasi Politik Ibn Taymiyah*", The Al-Falah Institute Yogyakarta, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Candra, Afrizal, Anton, "*Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)*", Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.

Mahmudin, "*Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*", Staf Pengajar Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, Tahdis Volume 6 Nomor 2 Tahun 2015.

Sugiharto, "*Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Bai'ah dan*

Relevansinya dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden", IKA-Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 6, No. 2, Mei 2017.

Swasana, Iwan, Muntasir dan Muzaffarsyah, Teuku, "*Pemikiran Politik Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara)*", Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Jurnal Politik dan Pemerintahan Volume 1 Nomor 2 Oktober 2016

Qamaruzzaman, "*Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*", STAI Mempawah Kalimantan Barat : Vol 2 No 2 Juli – Desember 2019

Habibul Wahyudi (1201111964), *Demokrasi dalam pemikiran Muhammad Natsir (1945-1950)*, Universitas Riau : Skripsi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan.

Muhammad Redy Alvan (0901131717), *Kekuasaan Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun*, Universitas Riau : Skripsi S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan

Silvia Citra (1401120642), *Kompetensi Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru*, Universitas Riau : Skripsi S-1 Jurusan Administrasi Negara.

Priandoko (1001112164), *Pengaruh Pemikiran Politik Hassan Al-Banna Dalam Partai Keadilan Sejahtera Pasca Reformasi Di*

Indonesia Tahun 1998-2014,
Universitas Riau : Skripsi S1
Jurusan Ilmu Pemerintahan

Wirdatul Jannah (1401119875),
*Pemikiran Politik Abdurahman
Wahid tentang Demokrasi Di
Indonesia*, Universitas Riau :
Skripsi S1 Jurusan Ilmu
Pemerintahan.

Weny Kurnia Sari (1401122017),
*Studi Pengembangan Karier
Pegawai Negeri Sipil Pada
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Riau*, Universitas
Riau : Skripsi S-1 Jurusan Ilmu
Administrasi Publik.

Paisal Tanjung (1301110242), *Amin
Rais dan Gagasan Tentang
Ketatanegaraan*, Universitas
Riau : Skripsi S1 Jurusan Ilmu
Pemerintahan.

Web

Kemenag Jabar, Implementasi
Profesionalisme Budaya Kerja /
[https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/im
plementasi-profesionalisme-budaya-kerja](https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/implementasi-profesionalisme-budaya-kerja) /
diakses Kamis tanggal 25 Februari 2021
pukul 08.00 WIB

[Pusdiklatwas.bpkp.go.id](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id), “ *Dilema
Jati Diri Keuangan Negara*“,
penulis : Mustafa Kamal,
diunduh tanggal 22 Oktober
2020, pukul 16.05 WIB

Suara.com, “Sejarah Peradaban Islam
Dari Periode Klasik Hingga
Modern” /
[https://www.suara.com/news/2
020/04/30/155720/sejarah-
peradaban-islam-dari-periode-
klasik-hingga-modern](https://www.suara.com/news/2020/04/30/155720/sejarah-peradaban-islam-dari-periode-klasik-hingga-modern) / diakses
hari Sabtu tanggal 06 Juni
2020, pukul 9 : 58 WIB